



PEMERINTAH
KOTA PALU



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

KOTA PALU TAHUN 2023



H. HADIANTO RASYID

RENY LAMADJIDO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu atas capaian visi.misi, tujuan, sasaran, tugas dan fungsi, agenda kerja serta anggaran selama Tahun 2023.

LAKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja pada Perangkat Daerah Kota Palu serta analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. LAKIP ini juga memuat informasi mengenai keberhasilan serta tantangan Pemerintah Kota Palu dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini dapat digunakan untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang.

LAKIP Kota Palu Tahun 2023 dapat dijadikan sarana untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kota Palu di masa yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan, karena keberhasilan dan pencapaian target kinerja merupakan hasil kerja keras dan kerja sama yang baik antar perangkat daerah serta dukungan positif dari semua pihak.

Olehnya, atas nama Pemerintah Kota Palu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kota Palu dan berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palu di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP tahun berikutnya.

Demikian Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang objektif terkait capaian kinerja Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2023 serta bermanfaat bagi pengembangan Kota Palu ke depannya.

Palu, 19 Maret 2024
Wali Kota Palu,

H.Hadiano Rasyid, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Gambaran Umum Kota Palu	11
1.2 Pembangunan Manusia Kota Palu	13
1.3 Perekonomian Kota Palu	14
1.4 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Palu	15
1.5 Isu Strategis Pemerintah Kota Palu	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Visi Dan Misi.....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu	31
1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023	32
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD 2023	35
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	37
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
3.2 Realisasi Anggaran	80
1. Pendapatan	80
2. Belanja Daerah	81
3. Pembiayaan	82

3.3 Inovasi Pemerintah Kota Palu	83
BAB IV PENUTUP	85
LAMPIRAN	87
1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023	88
2. Indikator Kinerja Utama.....	89
3. Penghargaan.....	98
4. Reviu Inspektorat	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis Daerah Kota Palu 2021-2026	23
Tabel 2.2	Sasaran Strategis daerah 2021-2026 Setelah Perubahan.....	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Capaian Indikator Kinerja	32
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD (2021-2026).....	32
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023	34
Tabel 3.4	Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD (2021-2026).....	36
Table 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi.....	38
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan Bencana.....	39
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	41
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur yang berketahanan	42
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM	43
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan.....	44
Tabel 3.11	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	45
Tabel 3.12	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.....	46
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	56
Tabel 3.14	Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2023.....	58
Tabel 3.15	Program dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	60

Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2023	81
Tabel 3.17 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2023.....	81
Tabel 3.18 Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2023.....	82
Tabel 3.19 Rekapitulasi Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah yang Dilaporkan Tahun 2023	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Palu	12
Gambar 1.2	Struktur Umum dan Jumlah Penduduk Kota Palu	12
Gambar 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu	14
Gambar 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu	15
Gambar 2.1	Visi dan Misi Pemerintahan	18
Gambar 2.2	Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026.....	19
Gambar 2.3	Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026.....	20
Gambar 2.4	Peta Proses Bisnis Kota Palu Tahun 2021-2026	22
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB 2023	37
Gambar 3.2	Program 1000 Perahu untuk Nelayan.....	38
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi	39
Gambar 3.4	Lembaga Adat Kota Palu.....	41
Gambar 3.5	Index Pembangunan Manusia	44
Gambar 3.6	Realisasi Indikator Angka Kemiskinan.....	45
Gambar 3.7	Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	47
Gambar 3.8	Pelaksanaan coaching SAKIP	48
Gambar 3.9	Pelaksanaan coaching OPD dalam perumusan IKU Pemda	48
Gambar 3.10	Perjanjian Kinerja Bappeda sebelum dan sesudah Perubahan IKU	49
Gambar 3.11	Perjanjian Kinerja sebelum perubahan	49
Gambar 3.12	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman setelah perubahan	49
Gambar 3.13	Pohon Kinerja Pemerintah Kota Palu sebelum & setelah perubahan	50
Gambar 3.14	Indikator Kinerja Pemda dan PD dan setelah perubahan	51
Gambar 3.15	Cascading Pemerintah Kota Palu sebelum & setelah perubahan	51
Gambar 3.16	Aplikasi e-Mep	52
Gambar 3.17	Aplikasi Hadirku	52
Gambar 3.18	Aplikasi e-SAKIP Kota Palu	53
Gambar 3.19	Analisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja Dinas Sosial	54
Gambar 3.20	LHE Rekomendasi Internal 2022	54
Gambar 3.21	Pelaksanaan Asistensi oleh OPD bersama Evaluator Inspektorat	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan tanggungjawab dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air, melalui Laporan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat dan Informasi yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Palu dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangan. Prinsip *Good Governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Melalui hal ini Pemerintah Kota Palu berupaya menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, akuntabel, dan transparan untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan daerah. Hal ini dilaksanakan agar memberikan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 terdapat empat misi. Untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 12 (duabelas) Indikator Kinerja Utama. Capaian delapan sasaran strategis sebagaimana telah ditargetkan berdasarkan dua belas indikator kinerja utama yakni sembilan indikator kinerja sasaran di atas 100% atau sangat tinggi meliputi laju pertumbuhan ekonomi, indeks risiko

bencana, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kewaspadaan nasional, persentase luas Kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, indeks pembangunan manusia, indeks aktualisasi Pancasila, dan opini laporan keuangan Pemerintah Kota Palu. Sementara satu indikator nilai capaian tinggi yakni indeks reformasi birokrasi, dan dua indikator capaian sedang yakni indikator persentase jalan berkeselamatan dan angka kemiskinan. Untuk pengukuran Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila menggunakan hasil penilaian Tahun 2022. Hal ini dilakukan, mengingat penilaian Tahun 2023 masih dalam tahap penyelesaian oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Secara keseluruhan indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 terlaksana dengan rata-rata capaian sebesar 102,49 % atau kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan program dan kegiatan Pemerintah Kota Palu telah sesuai dengan visi Pemerintah Kota Palu yakni Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.

BAB I

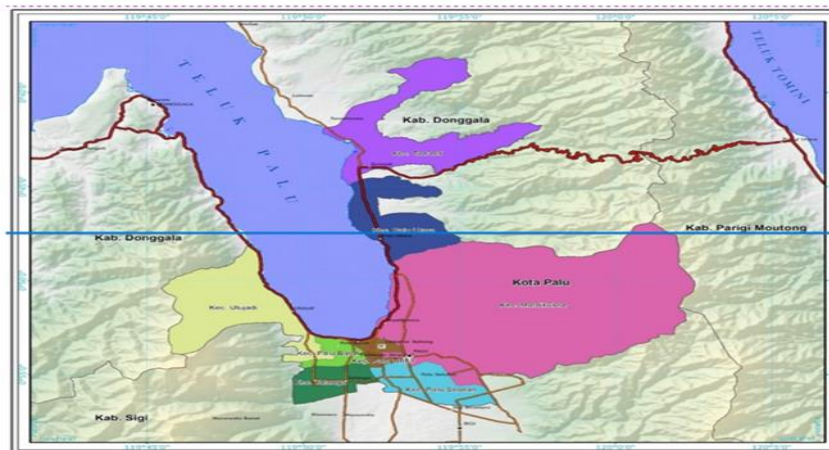
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 395,06 km² berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif, Kota Palu berbatasan sebelah utara dengan dengan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebelah selatan dengan Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan, 289 Rukun Warga, dan 1.030 Rukun Tetangga. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² atau hanya 1,95% dari luas wilayah Kota Palu. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sementara 17 (tujuhbelas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu.

Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Peta Kota Palu

Jumlah penduduk Kota Palu per 31 Desember 2023 sebesar 387.490 Jiwa (BPS,2023), dengan kepadatan penduduk sebesar 981 per km². Adapun penduduk laki-laki berjumlah 194.340 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 193.150 jiwa sehingga rasio jenis kelamin (*Population Sex Ratio*) sebesar 100,56%. Kota Palu memiliki struktur usia penduduk yang berbentuk piramida ekspansif, dengan sebaran didominasi usia produktif. Sebaran struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini :



Gambar 1.2
Struktur Umur dan Jumlah Penduduk Kota Palu

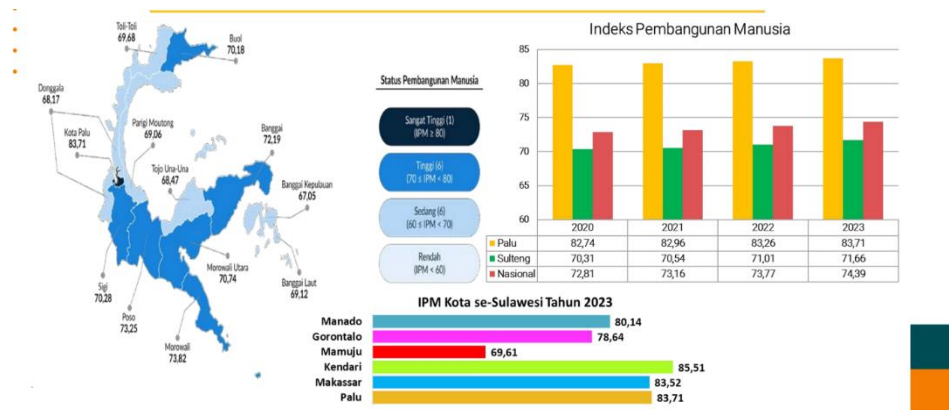
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Palu pada tahun 2021 adalah 30,66 %. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 31 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Palu telah menikmati bonus demografi.

1.2 PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM terdiri dari variabel pendidikan, variabel kesehatan, dan variabel kondisi ekonomi masyarakat. Variabel kesehatan meliputi indikator usia harapan hidup, variabel pendidikan meliputi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara kondisi masyarakat berdasarkan indikator daya beli masyarakat dengan melihat pengeluaran per kapita penduduk.

IPM Kota Palu termasuk kategori tinggi dengan realisasi 83,71 capaian kinerja sebesar 102,21% di Tahun 2023. Capaian ini mendudukkan Kota Palu sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Tengah. Tingginya IPM Kota Palu ditopang oleh peningkatan usia harapan hidup dari Tahun 2020 sebesar 73,46 tahun menjadi 73,49 tahun di Tahun 2021. Tahun 2022 sebesar 73,56, dan tahun 2023 menjadi 73,71 tahun. Untuk komposit pendidikan, dari rata-rata lama sekolah selama 11,61 tahun di Tahun 2020 menjadi 11,72 tahun di Tahun 2021. Tahun 2022 sebesar 11,73 tahun, dan 2023 selama 11,74. Untuk harapan lama sekolah dari 16,23 tahun di Tahun 2020

menjadi 16,28 Tahun di 2021, tahun 2022 selama 16,36 tahun dan tahun 2023 selama 16,51 tahun. Selanjutnya, indikator ekonomi terjadi perbaikan standar hidup yang layak dari sebelumnya. Hal ini dilihat dari pengeluaran perkapita sebesar 14,83 juta Tahun 2020 menjadi 14,89 juta di Tahun 2021 dan 15,16 di tahun 2022, selanjutnya tahun 2023 sebesar 15,50 juta. Trend perkembangan IPM Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini :



Gambar 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu

1.3. PEREKONOMIAN KOTA PALU

Kebijakan pembangunan Kota Palu sesuai dengan tema pembangunan Kota Palu Tahun 2023 yakni membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global. Pemilihan tema ini mampu mendorong bangkitnya kembali perekonomian Kota Palu pasca bencana alam dan dampak bencana non alam (Covid-19).

Perekonomian Kota Palu Tahun 2023 tumbuh sebesar 4.96 %. Hasil ini menunjukkan geliat perekonomian di Kota Palu semakin membaik. Untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 17.9 triliun. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palu Tahun 2023 sebesar 74,37 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2022 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini:



Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu

Melihat kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023, maka lapangan usaha pertambangan dan galian paling besar yakni sebesar 17.98 %, disusul lapangan usahatransportasi dan pergudangan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9.08 %, selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 6.1%.

1.4. SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA PALU

Pemerintah Kota Palu dipimpin oleh Walikota, H. Hadianto Rasyid, S.E dan Wakil Walikota, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes sesuai hasilPemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. Adapun periode menjabat yakni dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Pelaksanaan tugas Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta organisasi perangkat daerah.

Merujuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas sebanyak 23 Dinas;
5. Badan Daerah sebanyak 6 Badan; dan
6. Kecamatan sebanyak 8 Kecamatan.

Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu didukung oleh sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 sebanyak 6.194 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 3705 laki-laki atau dan 1705 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, rata-rata pendidikan PNS di Kota Palu adalah setingkat sarjana yakni sebesar 69,08 persen. Sementara, tingkat Diploma, SMA dan di bawah SMA masing-masing sebesar 13,91 persen, 16,46 persen, dan 0,55 persen. Selain, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Palu juga didukung oleh sumber daya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 784 orang terdiri dari 190 perempuan dan 594 berjenis kelamin laki-laki.

1.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PALU

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 86 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai Berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata;
- 2) SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing;
- 3) Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi Kemiskinan kota;
- 4) Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 6) Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan berkelanjutan.



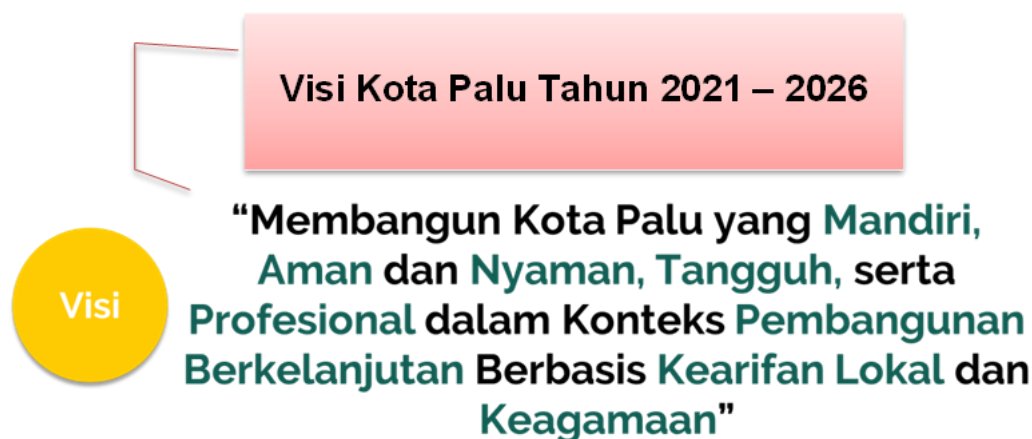
BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

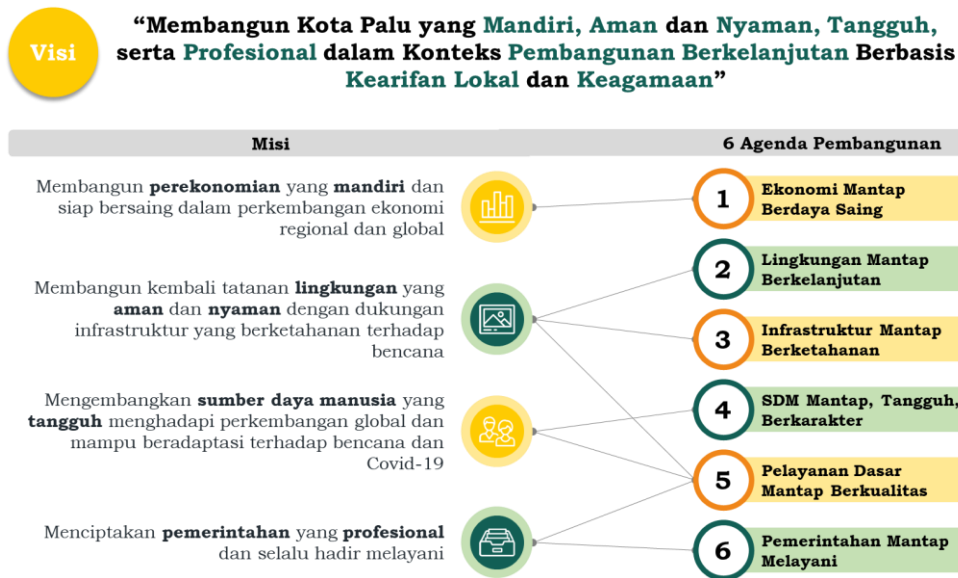
2.1 VISI DAN MISI



Gambar. 2.1
Visi, Misi, Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026

Tahun 2020 Kota Palu melakukan pemilihan kepala daerah. Kontestasi tersebut, menetapkan H. Hadianto Rasyid, S.E Wali Kota Palu Kota Palu dan dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes.,Sp.PK sebagai Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk periode 2021-2026. Pelantikan Wali Kota dan WakilWali Kota terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sertaPermendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026, ditetapkan visi dan misi Kota Palu.



Gambar. 2.2
Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yang diuraikan ke dalam enam Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Ekonomi Mantap Berdaya Saing;
2. Lingkungan Mantap Berkelanjutan;
3. Infrastruktur Mantap Berketahanan;
4. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter;
5. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan
6. Pemerintahan Mantap Melayani.



Infrastruktur Mantap Berketahanan

1. Bangun Palu Tahan Gempa (Palu Tangguh Bencana)
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu



SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya
2. Badan Pelayanan Rumah Ibadah
3. Palu Berbagi
4. Palu Religi
5. Pelestarian Seni Budaya
6. Palu Ramah Difable
7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu
8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu



Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
3. Penguatan UMKM dan Palu Market Place
4. Revitalisasi Perpustakaan Kota Palu
5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
7. Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
10. 1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
11. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Forum Komunitas Kreatif Kota Palu (Palu Creative Hub)



Lingkungan Mantap Berkelanjutan

1. Palu Adipura
2. Palu Terang
3. Palu Hijau
4. Palu Ramah, Aman, dan Tertib
5. CSR Forum
6. Satgas Cepat Tanggap
7. Kelurahan Mantap 2 Miliar



Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas

Kesehatan

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
5. Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah

Pendidikan

1. 1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
2. Reward 2 Miliar Prestasi SD dan SMP
3. Persamaan Kualitas SD dan SMP se-Kota Palu
4. Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan
5. Update Berkala Kompetensi & Kapasitas Guru/Pengajar
6. Bus Gratis untuk Siswa Sekolah
7. Kepala Sekolah Magang Nasional



Pemerintahan Mantap Melayani

1. Audit APBD oleh Auditor Independen
2. E-Government (Palu Smart City)
3. Penerapan QSL (Quick Service License)
4. One Touch Info Kota Palu
5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorer
7. ASN Magang Nasional
8. Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan Lainnya di Kelurahan

Gambar 2.3

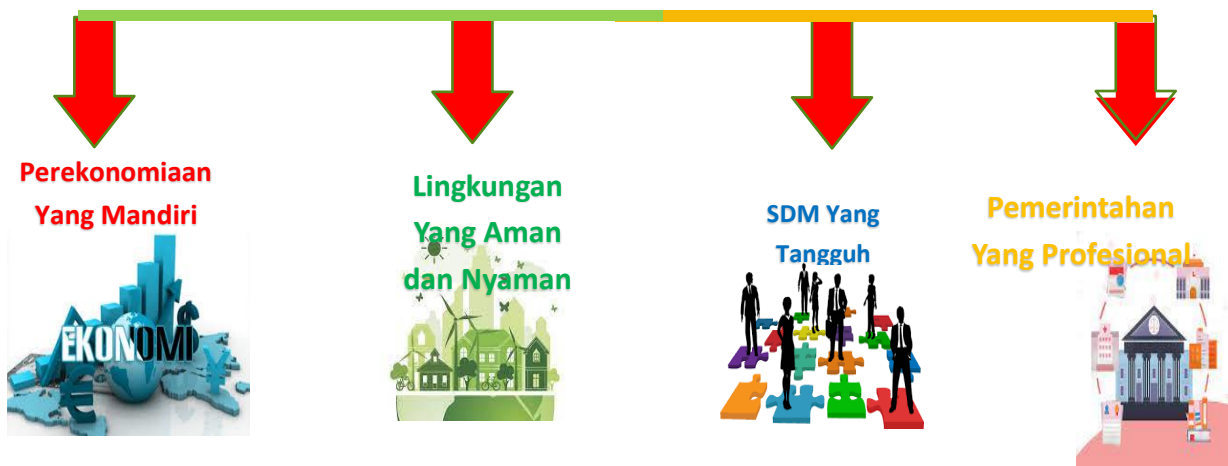
Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan

(*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu Kota Cerdas (*smart city*), Kota tangguh (*Resilience city*), Kota hijau (*green city*), dan Kota inklusif (*inclusive city*).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung, dan manajemen. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi terlebih dahulu keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM

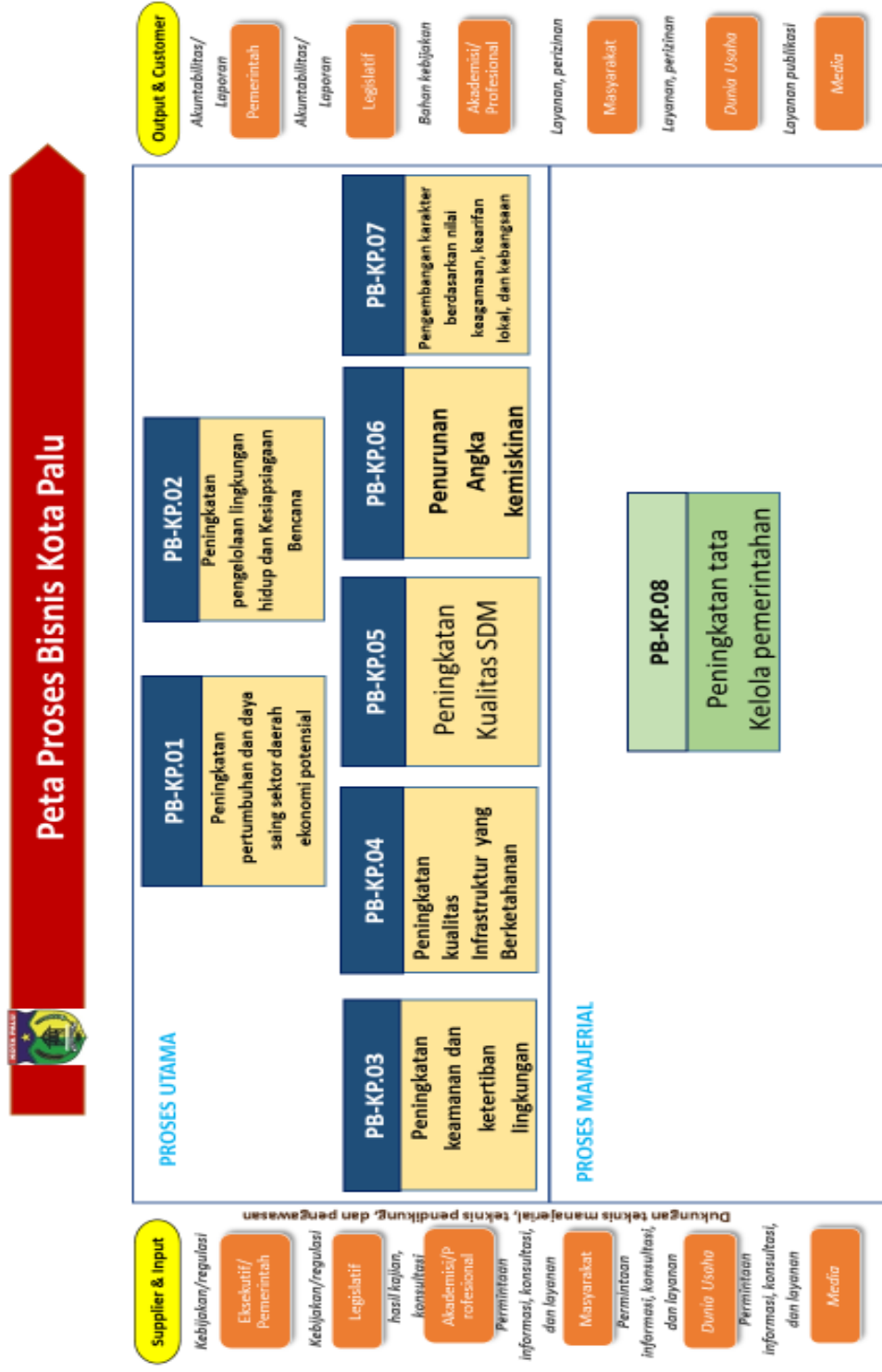


Misi I
Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional

Misi 2
Membangun kembali Tataan Lingkungan yang Aman dan nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana

Misi 3
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan

Misi 4
Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Hadir Melayani



Gambar 2.4
Peta Proses Bisnis Kota Palu Tahun 2021-2026

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
isi, Misi, Tujuan dan Visi, dan Sasaran Daerah 2021- 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan keagamaan	Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor daerah ekonomi potensial	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Membangun kembali Tata Lingkungan yang Aman dan nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan Bencana	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Indeks Risiko Bencana
					Indeks Kewaspadaan Nasional
					Persentase jalan yang berkeselamatan
	Meningkatnya Infrastruktur yang Berketahanan	Meningkatnya kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase luas kawasan kumuh	
				Persentase rumah tidak layak huni	
				Indeks Pembangunan Manusia	
	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19	Meningkatnya kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM	Angka Kemiskinan	
	Menurunnya Angka kemiskinan				

			Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila
	Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Hadir Melayani	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
				Opini BPK

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Hasil Perhitungan BPS Kota Palu	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	Publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum.
	Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (30% x Indeks Kualitas Air + 30% x Indeks Kualitas Udara + 40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup.
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	Perhitungan dari Dirjen Politik dan PUM Kemendagri	Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang kerkeselamatan	Panjang jalan Kota yang memenuhi standar keselamatan / panjang jalan kota x 100%	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
	Persentase luas kawasan kumuhv	Luas kawasan Permukiman kumuh (Ha) / Total Luas Wilayah (Ha) x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.
	Persentase Rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni / Jumlah Rumah di Kota Palu x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Hasil Perhitungan BPS Kota Palu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda & Olaraga.
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Hasil Perhitungan BPS Kota Palu	Dinas Sosial.
Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	Pengukuran dari BPIP RI	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi Hasil Penilaian Kemenpan-RB.	Semua Organisasi Perangkat Daerah
	Opini BPK	Hasil Audit BPK	BPKAD, Inspektorat

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan Dengan Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut, merupakan ukuran keberhasilan

berdasarkan hasil evaluasi dengan melakukan pemetaan isu strategis pemerintah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kota palu Tahun 2021- 2026, Sehubungan dengan upaya simplikasi dan penajaman sasaran pembangunan agar lebih fokus, maka dilakukan perubahan indikator kinerja utama yang selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan perjanjian kinerja pemerintah Kota Palu tahun 2023. Perubahan tersebut meliputi perubahan sasaran srategis dan indikator kinerja.

Berdasarkan Tabel 2.2 dan 2.4 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 sebagai berikut:

Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja.

Misi 2 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 6 (enam) indikator kinerja.

Misi 3 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Misi 4 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2023, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja. Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 dapat di uraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.3**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju Bertumbuhan Ekonomi	3.73
2	Meningkatnya Kulaitas lingkungan hidup dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	125,08
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,60
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional	61
4	Meningkatnya Infrastruktur yang berketahanan	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	4,39
		Persentase Luas Kawasan Kumuh	0,31
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni.	10,30
5	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	81,90
6	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,00
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	69
8	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Opini BPK	WTP

Program dan Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran IKU Pemerintah Kota
palu Tahun 2023

No	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 91,265,870,338	Rp. 85,658,797,888
2.	Indeks Resiko Bencana	Rp. 68,058,437,165	Rp. 66,026,525,962
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 71,924,283,593	Rp.69,351,587,327
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Rp. 22,328,821,404	Rp. 20,854,974,369
5.	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Rp. 166,569,173,198	Rp. 161,608,112,974
6.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Rp. 89,125,234,072	Rp. 87,881,340,872
7.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 5,306,919,001	Rp. 4,956,806,323
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Rp. 536,729,145,399	Rp. 519,418,926,335
9.	Angka Kemiskinan	Rp. 24,217,323,336	Rp. 23,095,483,039
10	Indeks Aktualisasi Pancasila	Rp. 8,000,819,170	Rp. 7,678,516,637
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp. 508,167,148,704	Rp. 466,049,954,236
12.	Opini BPK	Rp. 39,106,299,619	Rp. 36,780,335,913

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Palu dilakukan secara berkala yakni triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian sebagai umpan balik untuk perbaikan agar target kinerja dapat tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah (*problem solving*).

Untuk mempermudah pemaknaan atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Indikator Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interpretasi Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75%	Sedang
4	50,01% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan target kinerja berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagaimana perjanjian kinerja, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,73	4,96
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dn kesiapsiagaan bencana	2.	Indeks risiko bencana	125,08	132,3
		3.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,60	76,5
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks kewaspadaan nasional	61,00	75,09
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	5.	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39	2,94
		6.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	10,31	1,12

		7.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,31	0,28
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks pembangunan manusia	81,90	83,71
6.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	5,00	6,56
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks aktualisasi pancasila	69	76,29
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	11.	Indeks Reformasi Birokrasi	78	64,19
		12.	Opini BPK	WTP	WTP

Sumber data: BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu, 2024

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja
serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Realisasi	Persentase Capaian Target	Realisasi	Persentase Capaian Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	4,32	135%	4,96	132,98%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana	2.	Indeks risiko bencana	151,43	110%	132,3	105,77%
		3.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	69	93%	76,5	102,55%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks kewaspadaan nasional	100	100%	75,09	123,10%

4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	5.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,45	89%	2,94	66,97%
		6.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,50	109%	0,28	109,68%
		7.	Persentase rumah tidak layak huni.	1,59	185%	1,12	189,13%
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks pembangunan manusia	83,26	102%	83,71	102,21%
6.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	6,63	121%	6,56	68,80%
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks aktualisasi Pancasila	77,95	115%	76,29	110,57%
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	11.	Indeks Reformasi Birokrasi	58,88	89%	64,19	82,29
		12.	Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2023

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021– 2026 dengan rincian digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD (2021 – 2026)

1	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	% Capaian Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,73	4,96	132,98%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	2.	Indeks risiko bencana	125,08	132,3	105,77%
		3.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,60	76,5	102,55%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks kewaspadaan nasional	61	75,09	123,10%
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	5.	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39	2,94	66,97%
		6.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,31	0,28	109,68%
		7.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,30	1,12	189,13%
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks pembangunan manusia	81,90	83,71	102,21%
6.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	5,00	6,56	68,80%
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks Aktualisasi Pancasila	69	76,29	110,57%
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	11.	Indeks reformasi birokrasi	78	64,19	82,29%
		12.	Opini BPK	WTP	WTP	100%

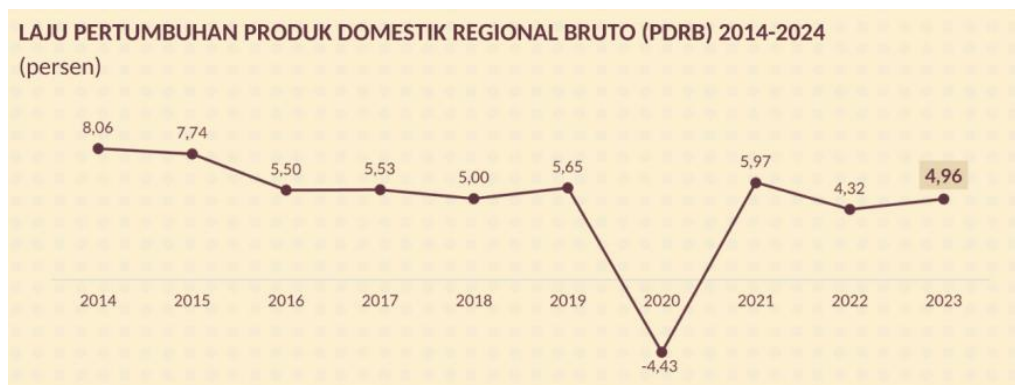
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana ditargetkan dalam RPMJD Tahun 2021-2026 dikategorikan tinggi. Hal ini disebabkan mulai Tahun 2021 adanya kebijakan pelonggaran kegiatan usaha dan sosial, namun tetap mengikuti protokol penanganan Covid-19. Adanya kebijakan pelonggaran tersebut, dapat meningkatkan realisasi dan capaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palu.

Adapun delapan sasaran strategis pemerintah Kota Palu diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 yakni Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah

Sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi diukur dengan menggunakan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 0,65% dari Tahun 2018. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga pertumbuhan -4,43%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif ke angka 5,97% yang disebabkan adanya pelonggaran dalam interaksi sosial sehingga mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi. Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi dan hanya tumbuh pada angka 4,32%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan ke angka 4,96% melampaui target 3,73 % atau capaian kinerja sebesar 132,98%.



Gambar 3.1 Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2023

Sumber : BPS Kota Palu, 2023

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,7	4,96	132,98	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja				132,98	Sangat Tinggi

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dengan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi realisasinya 4,96 dengan capaian 132,98 %, predikat sangat tinggi. Pencapaian sasaran indikator ini didukung dengan pelaksanaan berbagai event seni dan olahraga baik di tingkat kota maupun yang berbasis masyarakat di tingkat kelurahan/kecamatan, yang berdampak pada bergeraknya roda perekonomian utamanya sektor jasa dan perdagangan, seperti Palu Sport Event. Selain itu juga didukung dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui program penguatan UMKM, inkubator bisnis berbasis digital per kelurahan, 1000 perahu untuk nelayan Kota Palu, dan 4 miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan.



Gambar 3.2
Program 1000 perahu untuk nelayan



Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 2 yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan bencana.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana diukur dengan menggunakan indikator, indeks risiko bencana, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Realisasi dan capaian kedua indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Risiko Bencana	125,08	132,3	105,77%	Sangat tinggi
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,6	76,5	102,55%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja				104,16%	Sangat tinggi

Capaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup memiliki rata-rata capaian 104,16% dengan predikat sangat tinggi. dua indikator penyusunnya, indeks risiko bencana capaian 105,77% predikat tinggi, dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup capaian 102,55 predikat sangat tinggi.

Pencapaian target indikator indeks risiko bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana dengan program bangun Palu tahan gempa yaitu penataan kota berbasis zona rawan bencana dan pembangunan sesuai dengan standar tahan gempa. Selain itu juga melalui peningkatan kapasitas masyarakat dengan rutin melakukan simulasi bencana, pemberian informasi bencana, serta pembentukan kampung tangguh

bencana. Upaya lain yang dilakukan dengan pembangunan gudang logistik bencana, pemasangan rambu evakuasi, serta pembangunan lapangan olahraga dan Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan titik kumpul, jika terjadi bencana.

Indeks kualitas lingkungan hidup disusun oleh indikator indeks kualitas air 70, indeks kualitas udara 87,25, dan indeks tutupan lahan 67,76, pencapaiannya didukung dengan melakukan pengukuran indeks kualitas air dan tanah secara berkala sehingga jika terjadi pencemaran dapat langsung diambil tindakan. Peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan melalui program Palu hijau, pembangunan/rehabilitasi RTH, bantuan bibit tanaman bagi lahan pekarangan masyarakat. Selain itu peningkatan layanan pengelolaan sampah dengan rehabilitasi TPA dan penambahan armada pengangkutan sampah, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui TPS3R, bank sampah, sekolah adiwiyata dan pembentukan kampung iklim juga berperan dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Tahun 2023 Kota Palu memperoleh penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup dari KLHK yaitu :

- Penghargaan Nirwasita Tantra Kategori Kota Sedang Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diraih oleh SMPN 6 Palu
- Penghargaan ProKlim Utama diraih oleh RW 7 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu
- Penghargaan piala Adipura Tahun 2023.

Sasaran 3 yakni Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan digambarkan dengan indeks kewaspadaan nasional, dimana realisasi dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Kewaspadaan Nasional	61,00	75,09	123,10	Sangat tinggi

Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat bahwa indeks kewaspadaan nasional dengan target 61,00 mendapatkan capaian 123,10 Hal ini menunjukkan bahwa setiap laporan gangguan keamanan dan ketertiban tertangani secara tuntas. Gerak cepat untuk penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Satgas Reaksi Cepat, pembentukan satgas Pancasila, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama, Forkopimda, dan lembaga adat, masyarakat Kota Palu yang homogen, namun sangat terbuka dengan perbedaan. Selain itu, masyarakat masih menjalankan adat kebiasaan para leluhur yang masih tetap dilestarikan di wilayah Kelurahan.



Gambar. 3.4 Lembaga Adat di Kota Palu

Sasaran 4 yakni Meningkatnya Infrastruktur yang Berketahanan

Sasaran strategis meningkatnya infrastruktur yang berketahanan memiliki tiga indikator kinerja yaitu persentase jalan yang berkeselamatan, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni. Realisasi dan capaian keempat indikator tersebut terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur yang berketahanan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39	2,94	66,97	Sedang
2.	Persentase luas kawasan kumuh	0,31	0,28	109,68	Sangat tinggi
3.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,3	1,12	189,13	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja				121,92	Sangat Tinggi

Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan dapat dilihat dari Tabel 3.8, dimana indikator kinerja persentase jalan yang berkeselamatan dengan target 4,39 realisasi 2,94 serta capaian 66,97 predikat capaian Sedang, persentase luas kawasan kumuh dengan target 0,31 realisasi 0,28 dengan capaian 109,68 predikat capaian sangat tinggi, dan persentase rumah tidak layak huni dengan target 10,3 realisasi 1,12 dengan nilai capaian 189,13 predikat capaian sangat tinggi. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya infrastruktur yang berketahanan sebesar 121,92 % atau kategori sangat tinggi.

Indikator jalan berkeselamatan dicapai dengan pelaksanaan program peningkatan/rehabilitasi jalan, pembangunan/rehabilitasi drainase dan trotoar, pemasangan rambu lalu lintas yang sesuai, program Palu Hijau dengan penanaman pohon pelindung di sepanjang jalan, dan program Palu Terang dengan pemasangan lampu penerangan di sepanjang jalan untuk mencegah tindak kriminalitas di malam hari.

Pencapaian indikator persentase luas kawasan kumuh didukung dengan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh, rehabilitasi jalan dan drainase lingkungan, perbaikan sanitasi diantaranya dengan bantuan jamban yang dilengkapi septictank. Selain itu juga Pemerintah Kota Palu dibantu oleh Kementerian PUPR melalui program Kotaku.

Persentase rumah tidak layak huni berkurang melebihi target didukung oleh faktor adanya bantuan dana stimulan dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perbaikan sanitasi dengan

bantuan jamban disertai septictank, dan program 4 miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkulurahan.

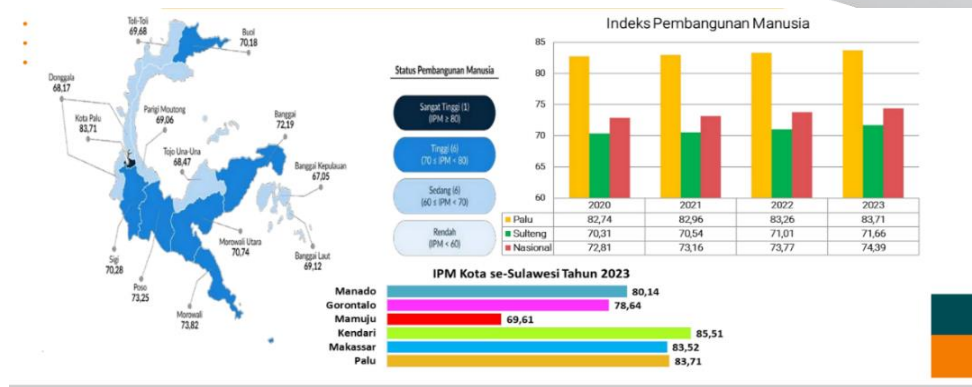
Sasaran 5 yakni Meningkatnya Kualitas SDM

Sasaran strategis meningkatnya kualitas SDM ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan target 81,9 realisasi 83,71 dan capaiannya 102,21 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks pembangunan manusia	81,9	83,71	102,21%	Sangat tinggi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari 3 dimensi yaitu kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita. Peningkatan dimensi kesehatan diantaranya melalui program Palu Kota Sehat, BPJS gratis bagi warga tidak mampu, peningkatan kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta peningkatan pelayanan kesehatan baik preventif maupun korektif. Pencapaian Kota Palu dari dimensi kesehatan dapat terlihat dengan diraihnya predikat Kota Sehat Tahun 2023 dengan kategori Swasti Saba Padapa. Peningkatan dimensi pendidikan dilakukan melalui program percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu, Biaya sekolah SD dan SMP negeri gratis, bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu, beasiswa S-1 bagi keluarga tidak mampu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, layanan bus sekolah gratis, serta peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya melalui magang kepala sekolah. Peningkatan dimensi ekonomi dilaksanakan dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong daya beli melalui pemberian bantuan modal usaha, penguatan UMKM, bantuan peralatan usaha, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta fasilitasi dalam pengurusan izin usaha baik terkait izin Halal maupun P-IRT.



Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran 6 yakni Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran strategis Menurunnya Angka Kemiskinan ditunjukkan dengan indikator Angka Kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Palu turun di Tahun 2023 dari sebelumnya 6,63% menjadi 6,56%, hal ini dicapai melalui program 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan, Palu berbagi, BPJS kesehatan gratis warga tidak mampu, BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya, Penguatan UMKM, 1000 perahu untuk nelayan Kota Palu, beasiswa bagi keluarga tidak mampu, dan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan. Realisasi dan capaian indikator ini disajikan pada Tabel 3.10.

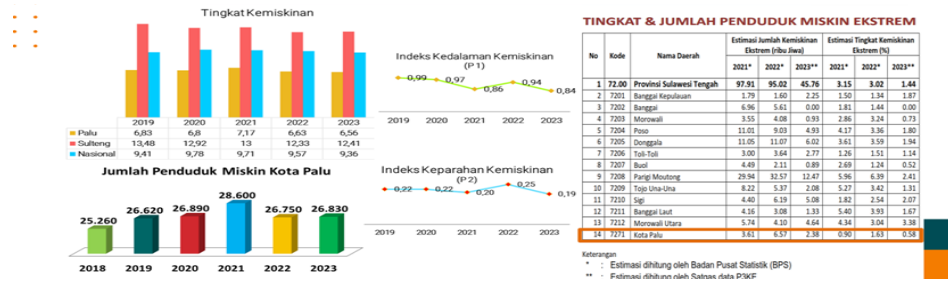
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Angka Kemiskinan	5,00	6,56	68,80%	sedang

Tabel 3.10 menunjukkan realisasi indikator angka kemiskinan di Tahun 2023 adalah 6,56% dengan capaian 68,8% predikat sedang. Capaian ini menunjukkan belum tercapainya target di Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam pencapaiannya diantaranya :

- Kurang tepatnya pemberian sasaran bantuan yang masih menjadi polemik di masyarakat
- Masih kurangnya semangat dan motivasi masyarakat dalam menjalankan usaha setelah menerima bantuan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palu untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi DTKS/P3KE mulai dari tingkat kelurahan, dan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang menerima bantuan melalui program inkubator bisnis berbasis digital per kelurahan.



Gambar 3.6 Realisasi Indikator Angka Kemiskinan

Sasaran 7 yakni Meningkatkan Pengembangan Karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal, dan kebangsaan

Sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal, dan kebangsaan digambarkan melalui indikator Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Adapun pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Aktualisasi Pancasila	69	77,95	112,9	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				112,9	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kota Palu, 2023

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2023, masih menggunakan data capaian tahun 2022 karena data tahun 2023 belum dipublikasi, masih dalam tahap penyelesaian laporan akhir oleh BPS RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Realisasi capaian indeks aktualisasi Pancasila sebesar 77,95 dari target sebesar 69 sehingga nilai capaian kinerja yakni 112,9% atau kategori sangat tinggi.

Capaian ini didukung oleh adanya nota kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) antara Pemerintah Kota Palu dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Selain itu, sebagai upaya dalam pencapaian target indikator ini dilakukan berbagai program di antaranya pembentukan Satgas Pancasila, peningkatan peran lembaga adat, pembekalan PIP pada Paskibraka, pendidikan PIP bagi guru, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan komponen masyarakat lainnya di Kota Palu.

Sasaran 8 yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi dan opini BPK, realisasi dan capaian indikator tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	78	64,19	82,29	Tinggi
2.	Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				91,145	Sangat tinggi

Pencapaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB Tahun 2023 adalah 64,19 dengan target 78 sehingga diperoleh capaian 82,29% atau predikat tinggi. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2022 nilai indeks reformasi birokrasi adalah 58,88. Peningkatan nilai ini didukung oleh kinerja seluruh perangkat

daerah dalam upaya memperbaiki indikator pencapaian reformasi birokrasi, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik. Realisasi ini belum mencapai target dalam RPJMD sehingga masih perlu adanya upaya perbaikan. Walaupun penilaian Reformasi birokrasi telah menerapkan reformasi birokrasi berdampak yaitu reformasi birokrasi General dan Tematik.

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palu, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Indeks RB Pemerintah Kota Palu tahun 2023 adalah 64,19 dengan kategori "B".
Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	55,87
B	RB Tematik	20	8,32
C	Indeks RB	120	64,19
			(B)

Gambar 3.7 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Palu di Tahun 2023 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya 100% predikat sangat tinggi. Pemerintah Kota Palu telah memperoleh predikat WTP selama 10 kali berturut-turut sejak Tahun 2014. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kota Palu sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Palu. Predikat WTP ini dipertahankan melalui peran serta BPKAD dan seluruh OPD dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

REKOMENDASI PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Berbagai rekomendasi perbaikan AKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah disampaikan pada tahun 2022 telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Melanjutkan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan berkala untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan level Pemda dan PD telah spesifik, berorientasi hasil, menjawab mandat, dan terjaga ketepatan level pengampu kinerjanya serta selaras dengan isu strategis daerah.

Tindak Lanjut:



Gambar 3.8
Pelaksanaan coaching SAKIP

Melakukan perumusan kembali sasaran strategis pada level Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/*outcome* pada level Pemerintah Daerah *coaching* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu bersama tim evaluator Kementerian PAN-RB.



Gambar 3.9
Pelaksanaan coaching OPD dalam perumusan IKU Pemda

Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja di dalam dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis sebagaimana *coaching* yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebagai contoh OPD yang melakukan perbaikan IKU, yakni Bappeda Kota Palu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.

Selanjutnya, dilakukan juga perbaikan Perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Bappeda sebelum dan sesudah Perubahan IKU



Gambar 3.10 Perjanjian Kinerja Bappeda sebelum dan sesudah Perubahan IKU

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu sebelum perubahan dan setelah perubahan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALU**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	0,55 %
	Persentase rumah tidak layak huni	10,85 %
	Cakupan pelayanan PUJ	65,10 %
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	B

Program	Anggaran	Ket
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,826,663,799.00	
2. Pengembangan Perumahan	Rp 2,319,462,200.00	
3. Kawasan Permukiman	Rp 11,752,879,325.00	
4. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 65,023,762,510.00	

Gambar 3.11 Perjanjian Kinerja sebelum perubahan

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah perubahan.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALU**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	0,32 %
2. Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	10,30 %
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	B

Program	Anggaran	Ket
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,719,698,095	
2. Pengembangan Perumahan	Rp 503,366,000	
3. Kawasan Permukiman	Rp 4,481,460,521	
4. Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp 14,591,593,200	
5. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 56,095,067,000	
Jumlah	Rp 80,391,184,816	

Palu, 02 Oktober 2023

Menyetujui,
Wakil Kota Palu



H. HADIANTO RASYID, SE

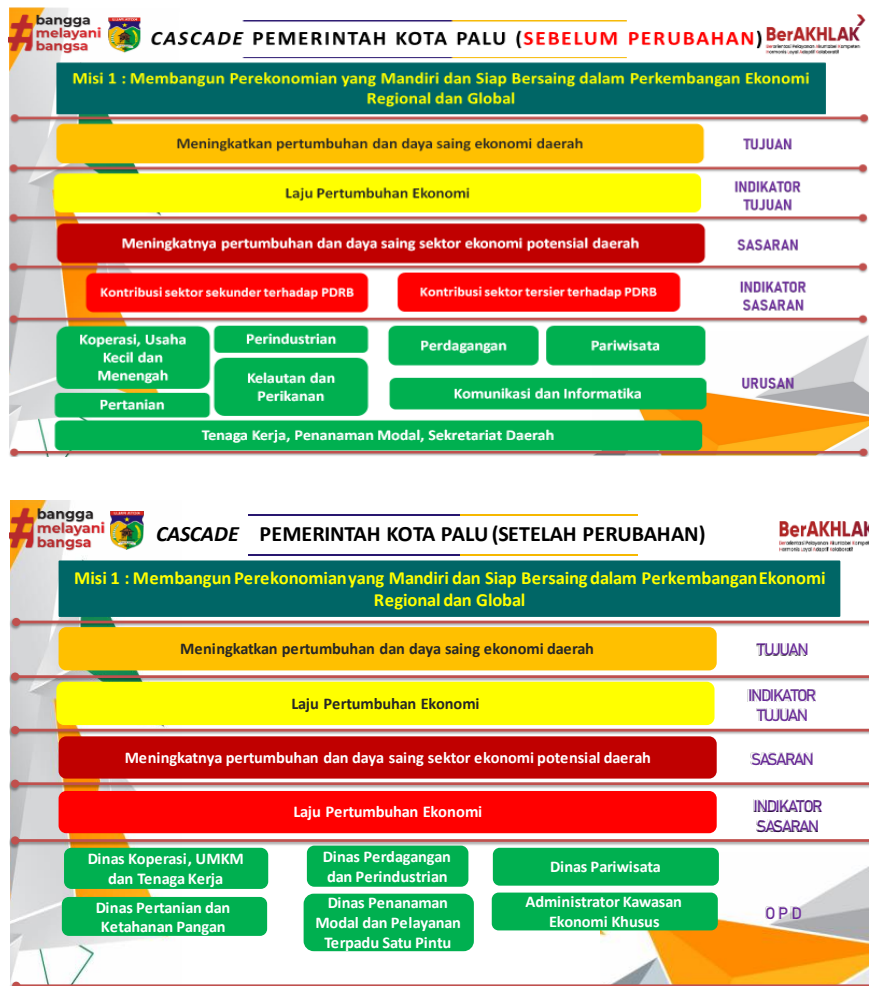
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Palu



LUKMAN, S.Pt, MM
Nip:19710222 199103 1 008

Gambar 3.12 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah perubahan

- Menyempurnakan proses penjenjangan kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang di Pemerintah Kota Palu



Gambar 3.13 Pohon Kinerja Pemerintah Kota Palu sebelum & setelah perubahan

- Memastikan setiap kinerja pada Pemda maupun PD telah dilengkapi indikator kinerja, kemudian menyempurnakan indikator tersebut agar memenuhi kriteria SMART dan cukup dalam mengukur pencapaian kinerja, serta memastikan relevansi formulasi perhitungan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan;

LAMPIRAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PALU
NOMOR 000/110/2023/AN/DAIRY/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1			
2	Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	(50% capaian sasaran Pemkot + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% capaian program perangkat daerah) dikali 100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perincian	Perencanaan Daerah
1. Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	1. Hasil Pelaksanaan RPJMD Kota Palu	1. Dinas Perencanaan, Dinas Ekonomi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Administrasi, Dinas Ekonomi
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat	2. Indeks risiko bencana	1. Pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	1. Dinas Perencanaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	3. Indeks kualitas lingkungan hidup	1. Laju = $\frac{SDP \text{ (mudik) - Suku Mutu Air}}{SDP \text{ (mudik) - Suku Mutu Air} + 4000}$ x 100	1. Dinas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4. Indeks pembangunan manusia	1. Pelaksanaan Data Pokok Pembangunan	1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Palu, 09 Maret 2023
KEBALA SAMPRAK KOTA PALU,
WALI KOTA
[Tanda Tangan]

Gambar 3.14 Indikator Kinerja Pemda dan PD dan setelah perubahan

- Memastikan kembali penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/ logical framework dan mengutamakan CSF sehingga nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan yang ada hingga mampu membantu proses identifikasi program/kegiatan yang tidak memiliki peran signifikan dalam pencapaian kinerja;

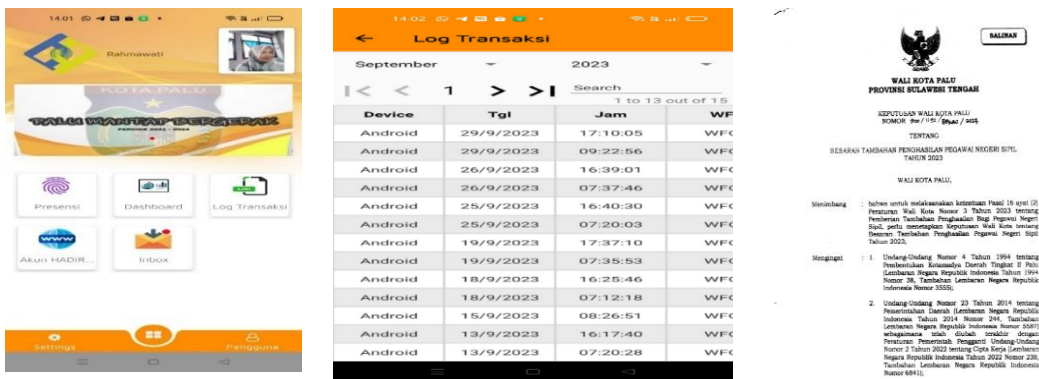


Gambar 3.15 Cascading Pemerintah Kota Palu sebelum & setelah perubahan

- Mengawal ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang TPP agar diberlakukan dengan baik yaitu memperhatikan proporsi komponen produktifitas kerja dan kedisiplinan kerja.



Gambar 3.16 Aplikasi e-Mep

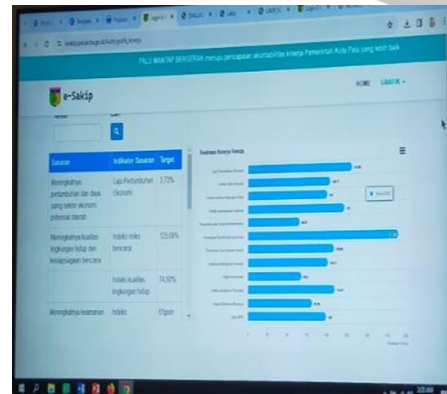
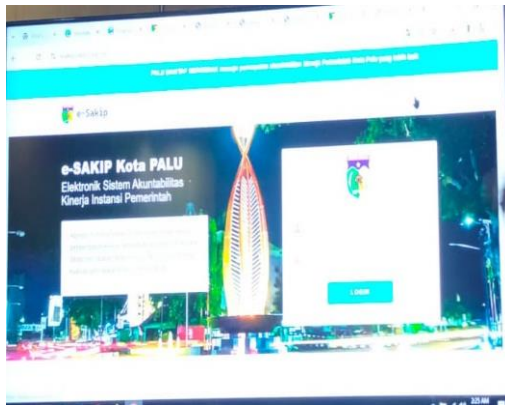


Gambar 3.17 Aplikasi Hadirku

6. Mendorong dilakukannya pengumpulan dan pengukuran data kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja telah menghasilkan data capaian kinerja sesuai PK bukan terbatas pada realisasi serapan anggaran.

Tindak Lanjut :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten
- Perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah telah didukung dengan adanya aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kota Palu.
- Pengukuran Data Kinerja PD di aplikasi e-Sakip telah menampilkan capaian indikator kinerja utama setiap perangkat daerah secara periodik (Triwulan).



No ↑	Sasaran ↑	Indikator Kinerja Utama ↑	Tahun ↑	Target ↑	Satuan ↑	Tri Wulan 1				
						Target ↑	Satuan ↑	Capaian ↑	Hasil ↑	Ket
1	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	2023	92.75	%	0	%	0	0	

Gambar 3.18 Aplikasi e-SAKIP Kota Palu

7. Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja baik pada level Pemda dan PD dengan kedalaman informasi yang merata dan memadai, seperti eksplorasi analisis faktor pendorong atau penghambat dalam pencapaian kinerja, analisis program kegiatan yang mendorong capaian kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya analisis.

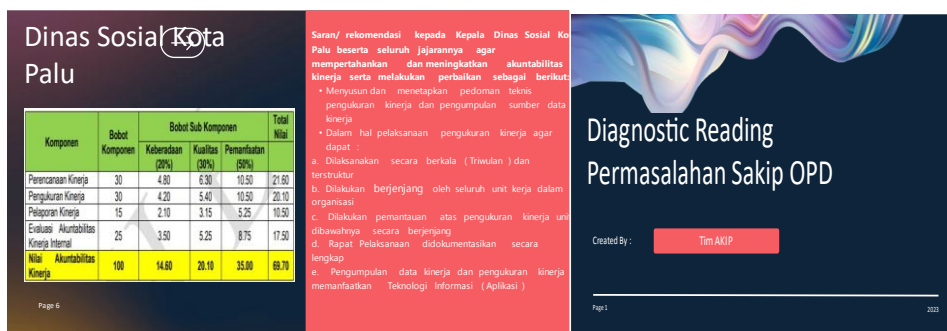
- melakukan pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Pedoman Penyusunan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang mempengaruhi realisasi kinerja dan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani maupun yang menerima bantuan sesuai dengan laporan dan hasil asesmen pendampingan baik dari masyarakat maupun dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan PPKS baik itu kesehatan dalam pemberian BPJS Kesehatan maupun pelayanan di rumah sakit, pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, penerbitan Dokumen kependudukan di Disdukcapil, pelayanan rumah singgah Nompeili Ntodea pemenuhan kebutuhan dasar, psikososial, kesehatan, pendidikan, memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi yang belum memiliki identitas, reunifikasi dan rujukan ke Balai rehabilitasi, dan peningkatan ekonomi keluarga PPKS melalui bansos lainnya yang berasal dari kementerian sosial, yang mempengaruhi realisasi kinerja dan capaian kinerja PSKS adalah, terciptanya kerja sama antar SDM yang melakukan Pemetaan Data berdasarkan informasi data penerima manfaat kelurahan, adanya Koordinasi mitra Dinas sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Gambar 3.19 Analisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja Dinas Sosial.

8. Mendorong inspektorat kota Palu untuk menyusun rekomendasi yang spesifik sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing PD dan melakukan fungsi asistensi terkait tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh PD Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi secara internal oleh Inspektorat Daerah, telah dilakukan bimbingan teknis oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Evaluator Inspektorat Daerah.



Gambar 3.20 LHE Rekomendasi Internal 2022



Gambar 3.21

Pelaksanaan Asistensi oleh OPD bersama Evaluator Inspektorat

Rekomendasi sesuai masalah yang dihadapi oleh PD Melaksanakan Asistensi terkait tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh PD bersama Evaluator Inspektorat.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2023 dengan realisasi anggaran Tahun 2023 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	3,73	4,96	132,98	91.265.870.338	85.658.797.888	93,86
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	125,08	132,3	105,77	68.058.437.165	66.026.525.962	97,01
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26	76,5	102,55	71.924.283.593	69.351.587.327	96,42
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional	61	75,09	123,10	22.328.821.404	20.854.974.369	93,40
4.	Meningkatnya struktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39	2,94	66,97	166.569.173.198	161.608.112.974	97,02
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,31	0,28	109,68	89.125.234.072	87.881.340.872	98,60

		Persentase rumah tidak layak huni.	10,3	1,12	189,13	5.306.919.001	4.956.806.323	93,40
5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	81,9	83,71	102,21	536.729.145.399	519.418.926.335	96,77
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5	6,56	68,80	24.217.323.336	23.095.483.039	95,37
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	69	76,29	110,57	8.000.819.170	7.678.516.637	95,97
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	78	64,19	82,29	508.167.148.704	466.049.954.236	91,71
		Opini BPK	WTP	WTP	100	39.106.299.619	36.780.335.913	94,05

Sumber : Bapedda Kota Palu Tahun 2023, diolah

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dengan membandingkan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Tabel di atas menunjukkan kinerja fisik sasaran daerah secara keseluruhan sudah tercapai 107,84 % dan untuk realisasi anggaran mencapai 95,29 %, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi anggaran tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Palu dalam penggunaan anggaran yang efektif dan berfokus pada *outcome* dan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	3,73	4,96	132,98	91.265.870.338	85.658.797.888	6,14
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	125,08	132.3	105,77	68.058.437.165	66.026.525.962	2,99
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,60	76,5	102,55	71.924.283.593	69.351.587.327	3,58
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	61	75,09	123,10	22.328.821.40	20.854.974.369	6,60
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39	2,94	66,97	166.569.173.198	161.608.112.974	2,98
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,31	0,28	109,68	89.125.234.072	87.881.340.872	1,40

		Persentase rumah tidak layak huni.	10,30	1,12	189,13	5.306.919.001	4.956.806.323	6,60
5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	81,90	83,71	102,21	536.729.145.399	519.418.926.335	3,23
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5,00	6,56	68,80	24.217.323.336	23.095.483.039	4,63
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan dan kearifan lokal dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	69	76,29	110,57	8.000.819.170	7.678.516.637	4,03
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	78	64,19	82,29	508.167.148.704	466.049.954.236	8,29
		Opini BPK	WTP	WTP	100,00	39.106.299.619	36.780.335.913	5,95

Selanjutnya, program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15
Program dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	IKU DAN PROGRAM	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		91.265.870.338	85.658.797.888
	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.136.766.760	1.133.885.760
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.226.000.940	4.039.442.955
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	190.654.467	189.656.150
		Program Pemasaran Pariwisata	2.510.547.950	2.426.356.867

	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	127.092.200	118.507.360
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	105.776.900	99.562.900
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	10.976.882.800	10.521.947.600
		Program Pengembangan Ukm	3.361.141.364	3.133.565.650
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.899.748.995	4.631.885.189
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	970.655.000	772.672.063
		Program Penempatan Tenaga Kerja	18.147.500	18.147.500
		Program Hubungan Industrial	247.059.100	243.759.100
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	93.547.500	58.400.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.074.056.416	5.744.994.791

		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.347.278.430	4.001.791.420
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.200.803.600	1.980.534.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	336.214.400	329.934.960
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.448.819.469	5.925.463.071
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	43.750.000	38.850.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	37.657.200	33.604.200
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	215.182.300	214.869.800
		Program Promosi Penanaman Modal	131.083.500	128.908.330
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	417.847.540	366.997.290
	Kawasan Ekonomi Khusus	Program Promosi Penanaman Modal	73.728.500	71.936.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	150.307.850	147.683.936

		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	23.535.000	22.535.000
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	104.378.000	103.425.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.735.353.505	2.659.964.444
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	773.173.550	770.398.425
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	95.742.500	95.139.350
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.117.298.442	4.982.202.670
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.821.690.480	2.792.688.400
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.463.731.144	4.265.174.175
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	264.828.715	255.215.400
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.064.207.584	4.447.960.229

		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.734.462.700	2.615.778.029
		Program Perizinan Usaha Pertanian	22.791.900	22.256.900
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.907.566.215	14.416.568.108
		Rogram Penanganan Kerawanan Pangan	124.823.542	110.925.962
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	38.811.400	33.602.650
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	367.553.530	294.983.390
		Program Penyuluhan Pertanian	729.651.000	907.486.664
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	535.520.450	489.136.200
2	Indeks Risiko Bencana		68.058.437.165	66.026.525.962
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.693.400	910.172.169

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.498.870.329	6.131.032.833
		Program Penataan Bangunan Gedung	477.218.700	461.607.700
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	367.860.550	345.364.250
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	93.679.750	73.968.450
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38.322.000	33.664.500
		Program Penatagunaan Tanah	200.708.600	178.654.055
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.289.731.300	1.264.408.396
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.338.910.070	9.098.810.297
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	2.664.478.250	2.089.334.957

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.610.901.440	4.399.505.329
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	41.527.062.776	41.040.003.026
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71.924.283.593	69.351.587.327
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	621.816.510	586.496.600
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	686.114.427	542.419.436
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10.406.261.900	10.084.534.260
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	41.577.650	41.547.650
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3.199.466.222	3.150.680.522
		Program Pengelolaan Persampahan	46.104.600.546	45.096.878.211

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.864.446.338	9.849.030.648
4	Indeks Kewaspadaan Nasional		22.328.821.40	20.854.974.369
	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.156.128.600	3.012.507.900
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.434.025.248	12.401.148.319
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.476.280.556	3.412.112.050
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21.614.050	20.619.300
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2.023.722.250	1.799.205.250
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	217.050.700	209.381.550
5	Persentase Jalan yang Berkeselamatan		166.569.173.198	161.608.112.974

	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	4.472.871.267	4.255.834.730
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.209.416.681	11.262.499.099
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	149.713.330.250	145.939.803.245
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	173.555.000	149.975.900
6	Persentase Rumah tidak layak huni		5.306.919.001	4.956.806.323
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	503.366.000	393.251.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.803.553.001	4.563.555.323
7	Persentase Luas Kawasan Kumuh		89.125.234.072	87.881.340.872
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	4.481.460.521	4.348.970.665
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	14.591.593.200	14.580.123.196
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	56.095.067.000	55.780.698.353

	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2.811.159.610	2.746.278.969
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.554.093.496	4.318.082.217
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	325.594.800	163.500.972
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.266.265.445	5.943.686.500
8	Indeks Pembangunan Manusia		536.729.145.399	519.418.926.335
	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	71.306.721.855	68.937.089.417
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.341.259.250	2.332.536.493
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	288.022.181.558	279.198.511.599
		Program Pengembangan Kebudayaan	16.327.441.885	16.192.291.275
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	114.975.800	114.975.800
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.259.427.326	51.121.008.351

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.164.438.880	987.714.880
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	385.336.480	384.975.976
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.083.047.100	2.932.336.650
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.308.280.755	64.417.537.957
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	268.184.910	254.493.729
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.126.761.078	5.000.818.905
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.167.197.104	2.058.398.250
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.554.301.000	2.473.481.000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	43.629.970	37.403.330

		Program Perlindungan Perempuan	165.756.980	165.514.480
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	142.771.450	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.562.992.534	4.294.906.445
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	28.361.850	26.821.350
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	167.158.265	145.919.650
		Program Perlindungan Khusus Anak	54.496.300	48.368.800
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.709.737.489	13.903.287.379
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	651.659.125	641.699.125
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.773.026.455	3.748.835.494
9	Angka Kemiskinan		24.217.323.336	23.095.483.039

	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	621.200.000	603.250.000
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	28.000.000	27.516.700
		Program Rehabilitasi Sosial	1.037.742.954	1.028.391.074
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	15.340.653.572	14.567.058.430
		Program Penanganan Bencana	1.040.692.910	1.039.308.700
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.149.033.900	5.829.958.135
10	Indeks Aktualisasi Pancasila		8.000.819.170	7.678.516.637
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.437.882.585	4.293.141.053
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.562.936.585	3.385.375.584
11	Indeks Reformasi		508.167.148.704	466.049.954.236
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	22.449.030.496	2.198.878.172
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.084.332.250	4.074.993.642

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.935.748.071	37.368.263.782
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	254.034.000	251.247.720
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.272.279.050	4.219.554.848
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.438.133.010	4.213.802.881
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	282.757.700	280.257.700
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	177.483.000	163.975.984
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Program Pengelolaan Arsip	58.578.000	58.508.000
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	15.550.615	15.520.415
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.675.000	3.675.000
		Program Pembinaan Perpustakaan	209.402.500	203.293.750
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	5.648.850	5.648.850

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.259.648.497	5.081.782.929
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	961.654.960	957.980.760
		Program Pencatatan Sipil	191.383.500	190.087.500
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118.070.010	118.070.010
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	22.800.000	22.800.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.432.272.450	5.294.615.405
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.952.045.600	1.757.443.959
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.829.525.830	3.531.953.615
	Badan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.712.416.000	2.281.327.850
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.615.706.638	19.540.503.663

	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia Daerah	Program Kepegawaian Daerah	2.457.775.450	2.362.901.482
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.634.630.037	6.301.630.814
	RSU. Anutapura	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36.978.333.997	35.631.569.283
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	103.090.000	95.835.430
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	172.111.018.131	164.313.490.714
	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	21.197.094.750	20.597.378.882
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.232.337.465	27.579.368.718

	Kecamatan Palu Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	212.855.500	212.654.500
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.459.746.635	7.171.022.659
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	136.855.000	133.499.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.037.593.996	7.850.497.493
	Kecamatan Mantikulore	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	121.738.300	121.738.300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.484.257.670	9.457.898.231
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	318.642.500	316.292.500
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.323.662.166	10.179.024.751
	Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.066.400	10.066.400
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.840.072.002	5.645.356.777
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	270.740.000	270.740.000

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.512.489.326	7.328.790.850
	Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	81.642.450	56.515.150
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.269.702.758	5.098.277.392
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	243.002.250	226.729.750
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.315.857.923	7.123.216.664
	Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.271.000	14.721.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.789.059.746	6.680.201.169
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	262.480.000	253.205.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.623.274.151	7.385.354.682
	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.756.900	20.756.800
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.802.447.551	6.687.313.429

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	250.240.000	234.490.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.310.794.530	6.146.302.632
	Kecamatan Ulujadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	38.175.800	37.875.800
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.845.656.291	7.794.153.049
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	262.690.000	261.940.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.262.657.389	7.085.953.181
	Kecamatan Palu Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.354.300	5.354.300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.029.290.298	6.745.512.224
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	278.055.000	274.780.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.735.565.015	6.503.358.795
12	Opini BPK		39.106.299.619	36.780.335.913
	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	191.010.200	183.100.084

		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.241.209.278	2.126.357.770
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.782.969.969	9.613.744.599
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.467.520.400	9.931.605.047
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.822.940.250	2.727.725.416
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.600.649.522	12.197.802.997

3.2. Realisasi Anggaran

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi;
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan *money follow program* berbasis *outcome*;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.529.217.858.498,00 dengan rincian sebagai Berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan APBD Kota Palu Tahun 2023 pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada adanya peningkatan pendapatan melalui intensifikasi yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.529.217.858.498. Adapun laporan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
PAD	402.579.311.439	352.657.022.539,73	87,60
Pendapatan Transfer	1.076.415.440.441	1.059.460.712.212,-	98,42
Lain-lain Pendapatan yang Sah	50.223.106.618	504.106.618,-	1,00
Total	1.529.217.858.498	1.412.392.804.228,-	92,36

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2023

Tabel 3.16 menguraikan capaian PAD melebihi target dari yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 402.579.311.439 Realisasi PAD sebesar Rp352.657.022.539,73 atau sebesar 87,60%. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2023 sebesar Rp. 1.059.460.712.212,- atau mencapai 98,42% dari target yang direncanakan. Untuk realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya terealisasi sebesar Rp. 504.106.618 atau terealisasi 1,00 %.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pendekatan program dan kegiatan berbasis *outcome*. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kebijakan Belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam Tabel 3.17 :

Tabel 3.17
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN REALISASI		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	1	2	3	4
1	Belanja Operasi	1.327.955.632.383,-	1.207.364.351.451,-	90,92
2	Belanja Modal	360.377.781.807,-	345.215.809.464,-	95,79

3	Belanja Tak terduga	5.500.000.000,00	4.511.672.800,-	82,03
	Total Belanja	1.693.833.414.190	1.557.091.833.715,-	91,93

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.17 di atas, diuraikan bahwa belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 1.693.833.414.190 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.327.955.632.383,-, belanja modal sebesar Rp. 360.377.781.807,-, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 5.500.000.000,- Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp. 1.557.091.833.715,- atau 91,93% yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.207.364.351.451,00, belanja modal sebesar Rp. 345.215.809.464,-, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 4.511.672.800,-

3. Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini :

Tabel 3.18
Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2023
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2023

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	1	2	3	4
1	Penerimaan Daerah	173.615.555.692	173.615.555.691,95	100%
2	Pengeluaran Daerah	9.000.000.000	8.000.000.000,00	88,89
	Pembiayaan Netto	164.615.555.692	165.615.555.691,95	100,61

Berdasarkan Tabel 3.18 di atas penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. **164.615.555.692** terealisasi sebesar Rp. 165.615.555.691,95 atau 100,61% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan besar Rp. 9.000.000.000.00,-, namun tidak terealisasi.

3.3 INOVASI PEMERINTAH KOTA PALU

Berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementrian Dalam Negeri RI sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6287. Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 telah ditetapkan skor Indeks Inovasi Kota Palu sebesar 51,05 dengan predikat “ Inovatif”.

Pencapaian skor Indeks Inovasi Daerah tersebut di atas lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 50 sehingga angka capaian kinerja sasaran strategis mencapai 102,1 % dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian sasaran strategis diatas diperoleh berdasarkan representasi dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah lingkup Kota Palu selama kurun waktu dua tahun terakhir yang menjadi tolak ukur penilaian indeks inovasi trata Kelola pemerintahan maupun pelayanan publik yang jumlah usulan inovasi daerah sebanyak 16 usulan, 13 usulan diantaranya ditetapkan menjadi kebijakan inovasi daerah dengan status penerapan dan menjadi tolak ukur pengukuran indeks Kota Palu meliputi :

Tabel 3.19
Rekapitulasi Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah yang Dilaporkan Tahun 2023

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	OPD Pelaksana
1.	TATOPOMU	Tatakelola Pemerintahan	Bappeda Kota Palu
2.	RUMAH SINGGAH NOMPEILINTODEA	Pelayanan Publik	Dinas Sosial Kota Palu
3.	PELANGI DI KECAMATAN (Pelayanan Terintegrasi di Kecamatan)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
4.	LAMAR AKU (Layanan Mobile Pernikahan Dukcapil dengan KUA se-Kota Palu)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

5.	KASIKU BERGERAK (Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan yang Bersih, Gratis dan Praktis)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
6.	PAKAI MASKERLA (Pelayanan Keliling bagi Masyarakat Rutan dan Lapas)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
7.	SIRATUBOT (Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Chatbot)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
8.	SIMALEO BERGERAK (Sistem Mobile Pelayanan Dokumen Kependudukan Bersih, Gratis dan Praktis)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
9.	KALEDO GRATIS (Keliling Layanan di Sekolah Gratis)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
10.	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai)	Tatakelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
11.	ESIGA Sektor Kesehatan Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
12.	PELAYAN SEKSI (Pelayanan Khusus Disabilitas, Orang Sakit dan Lansia)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
13.	ALPUKAT (Anak Lahir Pulang Bawa Akta)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (***performance results***) Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2021-2026. Sasaran strategis sebanyak 8 sasaran sebagaimana yang telah ditargetkan. Target yang digunakan sebagai dasar pengukuran mencakup 12 indikator kinerja sasaran. Capaian dari 8 target sasaran yang meliputi 9 indikator kinerja sasaran di atas 100 %, sementara satu indikator nilai capaian tinggi dan dua indikator capaian sedang. Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila menggunakan hasil penilaian Tahun 2022, untuk penilaian Tahun 2023 masih dalam tahap penyelesaian oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Secara keseluruhan indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 102,49% atau kategori sangat tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Palu didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD

Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.529.217.858.498,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.412.392.804.228,- atau 92,3%, proses perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus, tematik, holistik, dan integratif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah diperjanjikan.

Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi perencanaan anggaran yang berbasis keluaran telah terlaksana dengan baik. Olehnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi internal menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palu di masa yang akan datang.



LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA PALU TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. HADIANTO RASYID, S.E**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 15 Maret 2023

WALI KOTA PALU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Hadianto Rasyid', written over a horizontal line.

H. HADIANTO RASYID, S.E

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,73
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	2.	Indeks risiko bencana	125,08
		3.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,60
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	61
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	5.	Persentase jalan berkeselamatan	4,39
		6.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,31
		7.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,30
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks Pembangunan Manusia	81,90
6.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	5,00
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks Aktualisasi Pancasila	69
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	11.	Indeks Reformasi	78
		12.	Birokrasi Opini BPK	WTP

No	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 91,265,870,338	Rp. 85,658,797,888
2.	Indeks Resiko Bencana	Rp. 68,058,437,165	Rp. 66,026,525,962
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 71,924,283,593	Rp.69,351,587,327
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Rp. 22,328,821,404	Rp. 20,854,974,369
5.	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Rp. 166,569,173,198	Rp. 161,608,112,974
6.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Rp. 89,125,234,072	Rp. 87,881,340,872
7.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 5,306,919,001	Rp. 4,956,806,323
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Rp. 536,729,145,399	Rp. 519,418,926,335
9.	Angka Kemiskinan	Rp. 24,217,323,336	Rp. 23,095,483,039
10	Indeks Aktualisasi Pancasila	Rp. 8,000,819,170	Rp. 7,678,516,637
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp. 508,167,148,704	Rp. 466,049,954,236
12.	Opini BPK	Rp. 39,106,299,619	Rp. 36,780,335,913



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 800/110/ORGANISASI/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR
800/116/ORGANISASI 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2021-2026**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/org/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tumbuhan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Wali Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/org /2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.
- KESATU :** Melakukan perubahan atas keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/ORG/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama

organisasi perangkat daerah Pemerintah kota Palu
sesuai tugas fungsi serta mandat yang diemban.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2023


WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA PALU
 NOMOR:800/116/ORGANISASI/2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PALU
 TAHUN 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
1.Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	Hasil Perhitungan BPS Kota Palu	Dinas Pariwisata,Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
2.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	2. Indeks risiko bencana	Publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum.
	3. Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (30% \times Indeks Kualitas Air + 30% \times Indeks Kualitas Udara + 40% \times Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup.
3.Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4. Indeks kewaspadaan nasional	Perhitungan dari Dirjen Politik dan PUM Kemendagri	Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	5. Persentase jalan yg berkeselamatan	Panjang jalan Kota yang memenuhi standar keselamatan / panjang jalan kota x 100%	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
	6. Persentase luas kawasan kumuh	Luas kawasan Permukiman kumuh (Ha) / Total Luas Wilayah (Ha) x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.
	7. Persentase Rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni / Jumlah Rumah di Kota Palu x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Meningkatnya kualitas SDM	8. Indeks Pembangunan Manusia	Hasil Perhitungan BPS Kota Palu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda & Olahraga.
6. Menurunnya angka kemiskinan	9. Angka kemiskinan	Hasil Perhitungan BPS Kota Palu	Dinas Sosial.

7. Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10. Indeks Aktualisasi Pancasila	Pengukuran dari BPIP RI	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
8. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	11. Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi Hasil Penilaian Kemenpan-RB.	Semua Organisasi Perangkat Daerah
	12. Opini BPK	Hasil Audit BPK	BPKAD, Inspektorat


WALI KOTA PALU,
HADIANTO RASYID

Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kota Palu Tahun 2023

1

Penghargaan Nilai SAKIP B

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Palu Tahun 2022 mendapatkan predikat baik atau Nilai SAKIP B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



2

Penghargaan OPINI WTP 2023

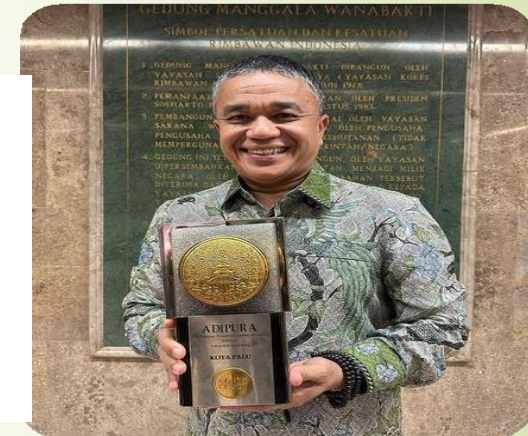
Tahun 2023 Pemerintah Kota Palu berhasil memperoleh apresiasi tertinggi dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu yang disajikan secara memadai yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa keuangan RI.



3

Penghargaan Piala Adipura dari Kementerian LHK 2023

Kota Palu berhasil mendapatkan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sebagai sebagai kota yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan di Indonesia Tahun 2023.



4

Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Sertifikat Penghargaan ISO 9001:2015 diberikan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, karena telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi syarat untuk Layanan E.SIGA (Tenaga Kesehatan).



5

Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Sertifikat Penghargaan ISO 9001:2015 diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu karena telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi syarat untuk Administrasi Kependudukan.



6

Penghargaan Green Leadership 'Nirwasita Tantra' Kategori Kepala Daerah

Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, SE, mendapat penghargaan Green Leadership "Nirwasita Tantra" Tahun 2023 Kategori Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. atas penerapan kebijakan atau program kerja, sesuai dengan prinsip metodologi



7

Penghargaan Pengembangan Smart City Tahun 2023 dari Kominfo RI

Kementerian Kominfo RI memberikan penghargaan kepada 50 daerah di Indonesia dalam pengembangan Smart City tahun 2023, salah satunya adalah kota Palu. Melalui kehadiran smart city ada enam aspek yang terpenuhi, meliputi Smart Government, Smart Branding, Smart Living, Smart Economy, Smart Society dan Smart Environment dapat dilakukan secara komprehensif berkelanjutan dan berkeadilan.



8

Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI 2023.

Penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan atas kesuksesan Pemerintah Kota Palu (Pemkot) dan TP-PKK Kota Palu dalam Pengelolaan Bangga Kencana Penghargaan Manggala Karya Kencana ini diberikan atas pencapaian yang menurut BKKBN sudah berjalan sesuai dengan harapan.



9

Penghargaan Pemerintah Kota Palu sebagai Predikat Kota Sehat Tahun 2023

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Palu di Malam Anugerah Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat (KKS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2023 Kategori Padapa oleh Kementerian Kesehatan.



10

Penghargaan Anugerah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 Kementerian PPN/Bappenas RI

Pemerintah Kota Palu menerima Anugerah Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD 2023. Dalam ajang ini, Kota Palu terima penghargaan terbaik II Anugerah PPD 2023. Penghargaan ini diberikan Kementerian PPN/Bappenas kepada pemerintah daerah atas prestasi menghasilkan perencanaan yang berkualitas pencapaian target-target pembangunan daerah, juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan.



11

Penghargaan Silver Achievement WTP Awards 2023.

Pemerintah Kota Palu berhasil meraih prestasi sebagai Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) Terbaik 1 tahun 2023 dalam Kemenkeu Satu (K1S) Awards tahun ini dan penghargaan atas capaian "Silver Achievement" dalam WTP Award dengan perolehan Opini WTP selama 9 tahun berturut-turut.



12

Penghargaan Wali Kota Palu dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Ajang Baznas Award 2024.

Pemerintah Kota Palu berhasil menerima penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat di ajang Baznas Award 2024. Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik bersama 25 wali kota se-Indonesia.



13

Piagam Penghargaan ADIWIYATA oleh Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan

Piagam penghargaan diberikan Kementerian Hidup & Kehutanan Republik Indonesia kepada SMPN 6 Palu sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 2023.



14

Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran 2023

Piagam penghargaan dinerikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu atas keberhasilan Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



15

Penghargaan Kota Layak Anak 2023

Kota Palu mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keseriusan dalam melindungi hak & perlindungan Anak.



16

Sertifikat RW 07 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Sertifikat diberikan sebagai Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama yg aktif melakukan aksi adaptasi & mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi dalam kontribusi upaya Pengendalian Perubahan Iklim oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



17

Penghargaan BRIDA Awards Predikat Pemerintah Daerah Terinovatif se-Sulawesi Tengah .

Pemerintah Kota Palu berhasil dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Terinovatif se-Sulawesi Tengah, pada kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Award 2023.



18

Piagam Penghargaan Terbaik III

Piagam penghargaan diberikan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah atas capaian Pemerintah Kota Palu dalam pelaksanaan mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023.



19

Piagam Penghargaan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2023

Kota Palu mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023



20

Sertifikat Penghargaan Keberhasilan Target Non Polio AFP

Sertifikat diberikan sebagai langkah Kota Palu dalam mencapai target Non Polio AFP oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



Kota Palu Raih Penghargaan Tahun 2023 atas Keberhasilan mencapai target Non Polio AFP

21

Piagam Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Puskesmas Kawatuna Kota Palu.



22

Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.



23

Piagam Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Palu.



24

Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Dinas Sosial Kota Palu



25

Piagam Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN.

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Puskesmas Kamonji Kota Palu.



26

Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.



27

Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu



28

Piagam Penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah atas Penerapan BLUD Puskesmas 100% Tahun 2023 di Kota Palu

Piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Palu sebagai Kabupaten/Kota yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas 100% Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah.



29

Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Palu Peringkat II PPD Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Kota Palu berhasil meraih peringkat II dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Melalui Penghargaan tersebut diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, diarahkan pada upaya untuk mengatasi berbagai isu-isu strategis pembangunan daerah. Antara lain seperti, sumber daya manusia yang berfaya saing, nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan daerah, konektivitas infrastruktur wilayah, kemiskinan dan Stunting, ketahanan bencana, perubahan iklim dan daya dukung lingkungan, serta reformasi birokrasi.



30

Penghargaan DPMPTSP Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Tahun 2023

Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Tahun 2023.



31

Penghargaan Mitra Terbaik BI dalam Pengendalian Inflasi di Sulteng 2023

Pemerintah Kota Palu menerima penghargaan berupa mitra strategis pengendalian inflasi terbaik Provinsi Sulteng untuk Kota Palu tahun 2023 pada acara yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) bertajuk Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional.

**32**

Penghargaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2023

Pemerintah Kota Palu Menerima Penghargaan Berupa Piagam Atas Kerja Sama Dan Dukungannya Dalam Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2023





PEMERINTAH KOTA PALU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen Soeprpto Nomor 36 Telp./Fax. (0451) 425542 Palu
Nomor Pengaduan Masyarakat : 08114506272,(0451)-4018003

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Intansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 21 Maret 2024



MULIATI, S.H., M.M.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650805 199203 2 014